

Deep Indonesia dan Ponpes Miftahul Falah Gelar Sosialisasi Pemilih Pilgub Jabar 2024



BANDUNG – Deep Indonesia menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024, yang bertempat di Waroeng Mas Priy, Kabupaten Bandung, Jumat (27/9/2024).

Acara ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari anggota Deep Indonesia dan beberapa tokoh penting, termasuk akademisi dari UNPAD dan perwakilan KPU Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama generasi muda, dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Koordinator Wilayah Deep Indonesia Jawa Barat, Fauziah Hanifah mengatakan pentingnya peran pemuda dalam menjaga jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang damai dan demokratis.

“Kabupaten Bandung memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar tanpa kekerasan,” ucap Fauziah.

Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Bandung, Ahmad Rosadi mengapresiasi peran Deep Indonesia dalam mendukung sosialisasi Pilkada 2024.

“Sosialisasi adalah tahap penting dalam pemilu, dan peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan pesta demokrasi ini. Partisipasi aktif dari masyarakat, terutama generasi muda, akan membuat Pilkada berjalan dengan lebih baik,” ujar Ahmad.

Dalam sosialisasi tersebut, juga diisi dengan sesi diskusi oleh beberapa narasumber ahli. Akademisi Unpad, Diah Fatma Sjoraida menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

“Demokrasi yang sehat bergantung pada partisipasi masyarakat. Jangan gadaikan hak pilih hanya demi uang atau sembako. Pemilu harus dilakukan dengan hati, bukan karena paksaan,” ucap Diah.

Sementara itu, Pemerhati Pemilu, Reza Alwan Sofnidar menyoroti pentingnya keterlibatan anak muda dalam penyelenggaraan pemilu.

“Banyak yang mengeluh soal kualitas pemilu, padahal kunci keberhasilannya ada pada kualitas penyelenggara. Anak muda perlu aktif sebagai petugas pemilu agar prosesnya lebih tertata dan mengikuti perkembangan zaman,” katanya.

Direktur Deep Indonesia, Neni Nurhayati mengatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam Pilkada adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

“Sebanyak 60% pemilih di Jawa Barat adalah anak muda, tetapi banyak dari mereka yang apatis terhadap politik. Kita perlu membangkitkan semangat partisipasi dan menjaga agar demokrasi tetap hidup. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dalam proses politik,” tuturnya.

Neni juga menekankan bahwa peran masyarakat tidak berhenti setelah mencoblos.

“Tugas kita sebagai pemilih tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak,” tandasnya.

Di tempat terpisah, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Jabar 2024, Pondok Pesantren Miftahul Falah bekerjasama dengan KPU Jabar dan Bawaslu Kabupaten



Kuningan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilih.

Acara ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari santri dan mahasiswa Miftahul Falah, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga penyelenggara pemilu.

Kegiatan yang berlangsung di Ponpes Miftahul Falah Kuningan ini, dimulai dengan sambutan dari berbagai tokoh yang berkomitmen pada pendidikan politik dan demokrasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada, sekaligus mencegah terjadinya politik uang yang sering mencederai demokrasi.

Ketua Pelaksana, Dedi Setiawan menyampaikan, harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat membantu masyarakat, khususnya

para santri dan mahasiswa, untuk lebih memahami pentingnya pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar dan peserta dapat memilih pemimpin yang mampu memajukan Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes Miftahul Falah, K.H. Aman Samsul Falah, juga memberikan pandangannya terkait pentingnya pemilihan pemimpin yang adil menurut prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

“Memilih pemimpin yang adil adalah kewajiban. Karenanya, sosialisasi dan pembekalan ini sangat penting agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan etika,” tegasnya.

Ketua LTN NU Jabar, K. Zainuddin menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada Harus terus ditingkatkan.



“KPU Jawa Barat menargetkan partisipasi pemilih naik 2% dari angka 74% pada Pilkada Sebelumnya. Untuk itu, sosialisasi pendidikan pemilih sangat penting,” ujarnya.

Meningkatkan Partisipasi dan Memerangi Politik Uang

Sosialisasi ini menyoroti isu krusial dalam pemilu, termasuk pentingnya memerangi politik uang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia menjelaskan tentang tahapan kampanye dan bahaya politik uang.

“Politik uang itu merusak demokrasi. Serangan fajar bukanlah rezeki, melainkan suap. Jangan gadaikan suara Anda hanya demi uang atau materi lainnya,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kuningan, Aan Nasruddin turut menekankan pentingnya mengecek nama di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengingatkan masyarakat untuk tidak bersikap apatis.

“Jika Anda belum terdaftar di DPT, partisipasi Anda menjadi sia-sia.

Pastikan anda sudah terdaftar agar dapat menggunakan hak pilih dengan benar,” tegasnya.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kuningan, Usep Agus Jawari menjelaskan tentang pelanggaran yang sering terjadi selama masa kampanye, termasuk politik uang dan manipulasi pemilih.

“Politik uang tidak hanya dilarang oleh undang-undang, tetapi juga merusak masa depan demokrasi kita. Kita harus cermat dalam membedakan antara biaya kampanye yang sah dengan politik uang yang merusak integritas pemilu,” jelasnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pemberian cinderamata. Acara ditutup dengan doa dan harapan agar Pilkada Jabar 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan dengan turut serta menyosialisasikan pentingnya partisipasi dalam Pilkada, serta melawan segala bentuk kecurangan, termasuk politik uang.

